



RAKERNAS APJII SUKSES HASILKAN KEBIJAKAN PRODUKTIF

FOKUS UTAMA

MEDAN – Rapat Kerja Nasional (rakernas) APJII 2019 sukses digelar. Agenda rutin yang mengambil tempat di Hotel Santika Dyandra, Medan, pada 26-27 Juni 2019 ini berhasil menghasilkan sejumlah kesepakatan yang produktif bagi anggota.

Ketua Dewan Pengawas APJII Ahmad Nur Effendi menilai, penyelenggaraan rakernas ini sukses berjalan tanpa kendala berarti, baik dari sisi akomodasi maupun suguhan istimewa yang ditawarkan panitia.

“Yang harus kami apresiasi juga, animo peserta menghadiri rakernas ini sangat tinggi di tengah persoalan mahalunya tiket pesawat dan musim liburan anak,” ujarnya.

Sebagai catatan, rakernas ini dihadiri oleh 259 peserta dari 159 perusahaan dari seluruh Indonesia. Perhelatan rakernas kali ini memang punya banyak aspek menarik.

Pembukaannya dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekhsah selaku tuan rumah.

Dalam sambutannya, Menkominfo Rudiantara menekankan peran penting APJII dalam jagat internet Indonesia. Salah satu persoalan yang disinggung adalah Data Free Flow with Trust (DTTF). Rudiantara pun mengajak APJII untuk menyusun kajian mengenai industri internet di Indonesia agar dapat tumbuh sehat.

“Saya mengimbau APJII untuk meng-adress isu mengenai DTTF. Dengan prasyarat yang perlu disesuaikan dengan konteks yang tidak sama dengan G20 sebagai penggagas isu tersebut di The G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy,” tegasnya.

Wakil Gubernur Musa Rajekhsah kembali mengingatkan salah satu pekerjaan rumah yang masih harus dikejar, yakni pemerataan akses internet. Menurutnya, di beberapa daerah seperti Kepulauan Nias, jaringan internet masih belum maksimal. Dia pun berharap APJII bisa terus mendorong jangkauan ke seluruh daerah di Sumatera Utara.

Dari lingkup internal, beberapa keputusan penting dihasilkan dalam rakernas kali ini. Dewan Pengurus berkomitmen untuk mengembangkan pengurus wilayah ke-33 provinsi di Indonesia. Yang mana sampai saat ini sudah terbentuk 13 pengurus wilayah.

Persoalan lain yang disepakati adalah pembentukan pengwil DKI Jakarta, yang dirasa belum diperlukan karena area ini masih bisa ditangani oleh pengurus pusat.

“Laporan pengurus secara umum sudah mencakup informasi yang diperlukan. Catatan saya lebih ke durasi waktu, yang sebaiknya diperpanjang dengan memaparkan pencapaian program selama ini,” ujar Ketua Dewan Pengurus Ahmad Nur Effendi.

Promosi Budaya Lokal

Selain membahas agenda penting organisasi, rakernas juga dimanfaatkan untuk mempererat tali silaturahmi anggota. Pihak panitia pun menyiapkan agenda khusus dengan menggelar gala dinner di sela-sela padatnya agenda rakernas. Lokasi yang dipilih pun sangat istimewa, yakni Istana Maimun yang menjadi ikon kebudayaan Melayu sekaligus destinasi unggulan Kota Medan.

Ketua Pengwil Sumut Bambang Heru Wijaksono menuturkan, acara gala dinner dirancang lebih santai dan hangat sehingga peserta bisa saling berinteraksi.

“Niat kami memang sekaligus memperkenalkan budaya lokal termasuk aneka kuliner seperti Uco Durian sampai Bolu Meranti,” katanya.

Rakernas dan open policy meeting (OPM) 2019 merupakan momentum bagi APJII untuk lebih agresif lagi meningkatkan penetrasi internet di Indonesia, terutama fixed broadband.

“APJII memiliki tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama pemerintah berupaya mencari terobosan baru untuk lebih meningkatkan jumlah pengguna internet di Indonesia, khususnya fixed broadband. Dengan adanya Palapa Ring, APJII bersemangat untuk dapat berkontribusi lebih jauh lagi,” tegas Ketua Umum APJII Jamalul Izza.***

Menegaskan Kembali Peran Sentral Organisasi



Penetrasi internet di Indonesia terus meningkat. Survey APJII 2018 menegaskan jumlah penggunaannya sudah mencapai 171,17 juta jiwa atau 64,8% dari total populasi. Ini tentu pencapaian yang sangat penting dan berharga.

Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus terus dikejar. Ada persoalan pemerataan akses, infrastruktur, hingga pemanfaatan data di tengah arus trafik yang membludak.

“Data is new oil,” kata Menkominfo Rudiantara di hadapan ratusan peserta rakernas 2019 di Medan.

Dalam konteks inilah rakernas APJII memainkan peran penting. Tidak hanya bagi organisasi, tapi juga bagi pengembangan internet di Tanah Air. APJII yang kini berusia 23 tahun tentu punya peran sentral yang menentukan jalannya industri.

Rakernas ini juga menjadi momen tepat untuk menguatkan fondasi organisasi. Saat ini APJII sudah hadir di 13 provinsi di Indonesia. Artinya, masih ada 20 provinsi yang belum disentuh. Padahal potensi bisnis di wilayah-wilayah ini tentu sangat besar. Penegasan komitmen Dewan Pengurus untuk terus mengembangkan organisasi menjadi salah satu momen penting dalam rakernas.

Sebagai sebuah asosiasi, APJII menjadi payung yang menaungi anggotanya. Sebagai timbal balik, anggota juga menunjukkan animo dan kontribusinya kepada organisasi yang sangat terlihat pada saat rakernas tahun ini. Dengan segala tantangan yang ada, sebanyak 259 anggota turut hadir memeriahkan Rakernas 2019.

Optimisme Dewan Pengurus, animo anggota, dan dukungan pemerintah tentu menjadi kombinasi penting mengukir pencapaian gemilang di masa mendatang. ***

REDAKSI

Publisher APJII

Managing Editor Henri Kasyfi Soemartono

Editor Much Rif'an

Penulis Tim APJII

Kontak Sekretariat APJII,

Gedung Cyber Lt. 11 Jln Kuningan Barat No. 8 Jakarta 12710
Indonesia

Phone +62-21 5296 0634

Fax. +62-21 5296 0635

Email bulletin@apjii.or.id

Pemerintah Siapkan Regulasi Pemblokiran IMEI Ponsel Ilegal

JAKARTA - Pemerintah sedang mempersiapkan aturan mengenai pemblokiran telepon seluler ilegal. Pemblokiran itu akan memanfaatkan database dari International Mobile Equipment Identity atau IMEI. IMEI ini merupakan identitas setiap ponsel yang dikeluarkan oleh produsen.

Regulasi tersebut, rencananya keluar pada Agustus mendatang melalui peraturan menteri (permen). Sebanyak tiga kementerian akan membuat permen ini, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Detailnya (isi aturan tersebut) itu sedang dibuat. Nanti pada 17 Agustus 2019, harus tanda tangan tiga peraturan menteri terkait pemblokiran lewat IMEI tersebut," ujar Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto dikutip dari Kompas.com.

Mekanisme kerja identifikasi itu, kata Janu, akan menggunakan sebuah mesin yang dimiliki Kementerian Perindustrian bernama Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS). Mesin ini diklaim dapat mengidentifikasi ponsel-ponsel ilegal.



Prinsip kerja mesin ini menggunakan nomor IMEI yang melekat pada setiap ponsel. Mekanismenya, mesin DIRBS akan memindai nomor IMEI mana saja yang terdaftar di database dan mana yang tidak. Jika tidak terdaftar, ponsel dengan nomor IMEI tersebut akan dianggap sebagai ponsel ilegal.

Meski beberapa waktu lalu Kementerian Perindustrian sempat menyatakan bahwa ponsel ilegal tidak akan bisa digunakan di Indonesia. Tidak berarti ponsel ilegal yang beredar di konsumen (eksisting) bakal diblokir dari jaringan operator seluler lewat identifikasi IMEI. ***

Masih Banyak Masyarakat Belum Sadar Pentingnya Keamanan Data Pribadi



"Ketika berbicara soal legislasi, maka kita harus memikirkan UU dibuat untuk masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya perlindungan data pribadi, terutama di Indonesia," kata dia dikutip dari Liputan6.com.

Namun, kata Meutya, DPR RI menyepakati bahwa perlindungan data pribadi penting bagi masyarakat, sehingga masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Maka itu, DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika aktif melakukan komunikasi untuk merumuskan RUU PDP ini.

"Namun, dari sisi keinginan publik masih belum prioritas karena kesadarannya masih kurang," jelasnya.

Senada dengan Meutya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel A Pangerapan, mengatakan masyarakat belum paham soal keamanan data.

Hal ini bisa dilihat dengan masih ada orang-orang yang membagikan data-data pribadi, seperti Nomor Kartu Induk (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) di layanan internet seperti media sosial. Padahal, tindakan itu sangat berbahaya jika data-data penting tersebut disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab.

Semuel pun berharap kehadiran RUU PDP nanti bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat.

"Ini (RUU PDP) merupakan salah satu cara untuk menyatukan regulasi (soal perlindungan data), dan sekaligus mengedukasi masyarakat soal data pribadi," ungkapnya. ***

JAKARTA - Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) sedang digodok oleh Pemerintah. Kemungkinan besar dibahas dan disahkan pada tahun ini.

Hanya saja, masyarakat belum memahami betapa pentingnya perlindungan data pribadi. Hal tersebut diutarakan oleh Meutya Hafid, Anggota Komisi I DPR RI,

NASA Berencana Buat GPS Bulan



JAKARTA - Ilmuwan rupanya sudah memikirkan kalau pergi dari Oceanus Procellarum ke Sea of Tranquility di bulan, mereka tentu butuh GPS. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dikembangkan.

Mengutip Tech Crunch dari Liputan6.com, bintang-bintang di angkasa sudah ditriangulasi dengan landmark sebelumnya sehingga memungkinkan pesawat ruang angkasa untuk mendeteksi berbagai lokasi.

Pembuatan GPS ini bisa dimulai dengan merakit satelit di orbit geosinkron yang memancarkan sinyal sebagai titik lokasi. Semakin banyak satelit, maka kian banyak titik lokasi sebagai databasedi GPS.

Tapi, tentu itu pekerjaan yang berat. Perbedaan jarak seperempat juta membuat pengaturan waktu dan sinyal harus benar-benar tepat.

Lembaga Antariksa Amerika Serikat (NASA) sempat menggunakan teknologi ini pada misi MMS (Magnetospheric Multiscale Mission) beberapa tahun lalu, meskipun tidak sepenuhnya.

"NASA telah bekerja mengembangkan teknologi high-altitude GPS selama bertahun-tahun. GPS di Bulan mungkin jadi inovasi berikutnya," ujar arsitek sistem MMS, Luke Winternitz, dalam keterangan resmi NASA.

Para astronot tentu saja tidak bisa langsung membawa smartphone ke angkasa. Perangkat harus dikalibrasi terlebih dahulu untuk menangkap dan menghitung sinyal dari satelit dalam kisaran jarak tertentu. Perbedaannya mungkin hanya sepersekian detik, tapi mempengaruhi sistem penerimaan.

Teknologi ini rencananya bakal dibenamkan di perangkat NavCube dan mendapatkan beberapa improvisasi. Diharapkan, NavCube akan rampung akhir tahun ini dan bisa diterbangkan ke bulan sesegera mungkin. ***

38 Persen Orang Amerika Usia di Atas 50 Suka Bermain Game

JAKARTA - Entertainment Software Association (ESA) melakukan survei. Dikutip dari Okezone.com, survei tersebut menyebutkan bahwa 38 persen orang dewasa Amerika usia di atas 50-an suka bermain game. Sementara 62 persen warga dewasa ini bukan pemain game.

Menariknya, kebanyakan dari mereka menggunakan laptop atau komputer dengan persentase 59 persen. Sementara sekitar 57 persen pemain video game menggunakan ponsel atau alat mobile.

Lebih lanjut, sekitar 6 dari 10 atau 59 persen gamer menyatakan mereka bermain game secara online. Tiga perempuan gamer bahkan menyatakan bermain setiap minggu. Empat dari 10 orang menyatakan bermain game setiap hari.

Bahkan para gamer perempuan ini lebih suka bermain game setiap hari daripada gamer pria (45 persen banding 35 persen). Perempuan (57 persen) secara signifikan lebih suka dibanding pria (43 persen) bermain game sekarang dibanding lima tahun lalu. Permainan kartu (46 persen), game logika/puzzle (44 persen), dan video game tradisional jadi tiga permainan paling banyak dimainkan.

Survei online ini dijalankan pada 9-17 Maret 2016 dengan mengambil sampel dari berbagai ras sekira 2.964 usia di atas 50 tahun. Ada pun sekira 1.510 merupakan gamer, sementara yang merupakan non-gamer sekira 1.454. AARP dan ESA menggunakan GfK Knowledge Panel untuk menjalankan riset ini. ***



Antisipasi terhadap Malware Agen Smith Menyerang WhatsApp Android

JAKARTA - Sebuah malware anyar bernama Agent Smith baru-baru ini dilaporkan menyerang banyak perangkat Android. Tak tanggung-tanggung, disebut malware ini telah menyerang 25 juta perangkat. Malware ini diketahui menggantikan aplikasi yang dipasang perangkat Android dengan versi berbahaya berisi iklan.

Perusahaan keamanan Israel Check Point yang menemukan malware ini menyebut Agent Smith mengeksploitasi beragam kelemahan di Android. Setelah itu, malware ini menggantikan aplikasi yang terpasang di perangkat pengguna tanpa diketahui.

Lantas, bagaimana cara mencegah menjadi korban malware Agent Smith?

Dikutip dari blog resmi Check Point via Liputan6.com, salah satu cara agar tidak menjadi korban malware ini adalah dengan mengunduh aplikasi dari toko resmi atau terpercaya.

Alasannya, malware Agent Smith kebanyakan berasal dari unduhan di toko aplikasi pihak ketiga bernama 9Apps. Perlu diketahui, toko semacam itu kerap tidak memiliki fitur keamanan untuk memblokir aplikasi dengan adware.

Sementara untuk perangkat Android yang terinfeksi malware Agent Smith atau pengguna yang ingin mengetahui apakah perangkatnya menjadi korban malware ini, dapat mencoba cara berikut:

1. Buka Menu Settings
2. Klik Apps atau Application Manager
3. Cari aplikasi yang mencurigakan dan hapus

Untuk mengetahui apakah sebuah aplikasi sudah terkena malware Agent Smith, pengguna perlu membukanya terlebih dulu dan mencari kejanggalannya. Contoh, jika pengguna memiliki WhatsApp yang menampilkan iklan, dapat dipastikan aplikasi itu berbahaya dan perlu dihapus.

Ada pula beberapa aplikasi yang dapat langsung dihapus saat menemukannya, seperti Google Updater, Google Installer for U, Google Powers, dan Google Installer.

Sekadar informasi, mengutip laman Forbes, kebanyakan korban malware Agent Smith berada di India. Setidaknya ada 15 juta perangkat Android yang terinfeksi. Sementara di AS, ada lebih dari 300 ribu Android terinfeksi, serta 137 ribu perangkat Android terdampak di Inggris.

Selain itu, malware ini menyebar melalui toko aplikasi pihak ketiga 9apps.com yang dimiliki oleh Alibaba. Biasanya serangan dari aplikasi non-Google Play menasar pada pengguna Android yang ada di negara berkembang. Hal ini membuat Agent Smith resmi jadi salah satu serangan malware terburuk dalam sejarah Android. ***



Menghindari Peretasan Aplikasi WhatsApp



JAKARTA - WhatsApp adalah salah satu aplikasi chat terpopuler yang terkenal karena keamanannya. WhatsApp juga terkenal dengan akun personal, karena menggunakan nomor HP pribadi. Seperti yang kita ketahui bahwa menggunakan dua nomor WhatsApp pada perangkat yang sama adalah hal mustahil.

Salah satu keunggulan utama dari WhatsApp adalah multiakses. Yang mana mengakses WhatsApp tak cuma di perangkat mobile, namun bisa menggunakan website di PC atau desktop. Anda bisa melakukan ini dengan mengakses WhatsApp Web di desktop.

WhatsApp Web adalah fitur canggih, yang memungkinkan pengguna mengirim atau menerima pesan melalui perangkat apa pun. Caranya, cukup mengaitkan akun WhatsApp dengan kode QR. Permasalahannya, kemudahan ini justru bisa menjadi media untuk para hacker nakal dalam melakukan peretasan kepada WhatsApp Anda.

Apakah Anda pengguna WhatsApp Web? Anda patut cari tahu apakah akun Anda aman dari retasan hacker atau tidak. Mari kita cari tahu caranya seperti yang dilansir dari Liputan6.com.

Pertama, buka aplikasi WhatsApp di smartphone. Lalu, klik tiga titik vertikal yang berada di sudut kanan atas. Kemudian, klik Web WhatsApp dan kamu bisa memeriksa, apakah ada perangkat lain yang ikut mengakses akun. Biasanya akan ditampilkan satu atau beberapa perangkat di dalam WhatsApp Web.

Jika ada nama perangkat lain yang belum pernah Anda pakai untuk masuk ke akun WhatsApp, maka biasanya itu adalah ciri bahwa akun Anda telah diretas. Terdapat solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah akun yang diretas. Anda bisa mengaktifkan verifikasi dua langkah. Caranya sebagai berikut:

1. Pilih menu di kanan atas
 2. Klik Pengaturan, lalu pilih Akun
 3. Jika sudah, aktifkan dua langkah verifikasi
 4. Ketika sudah diaktifkan, Anda akan diminta kode OTP yang tentu hanya Anda yang memiliki.
 5. Masukkan kode, dan WhatsApp kembali aman
- ***

Demi Tertib Frekuensi, APJII Teken MoU dengan Balmon DKI Jakarta



JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Balai Monitoring (Balmon) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Koordinasi yang dilakukan pada Mei lalu membahas tentang sosialisasi penggunaan frekuensi yang masih digunakan oleh beberapa anggota APJII. Frekuensi tersebut adalah 5.600 - 5.650 MHz.

Sumber daya yang didiskusikan itu, pada dasarnya tidak boleh digunakan oleh anggota APJII. Hanya boleh digunakan oleh BMKG untuk memantau keadaan cuaca dan pemantauan pesawat terbang.

"Jadi APJII melakukan koordinasi bersama BMKG dan Balmon Kominfo DKI Jakarta membahas masalah penggunaan frekuensi yang tidak boleh digunakan, selain BMKG. Sebab frekuensi tersebut dikhususkan untuk memantau cuaca, bencana alam, dan penerbangan," kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APJII, Eva Marlina.

Eva mengatakan, pihak BMKG yang difasilitasi oleh Balmon Kominfo DKI Jakarta, meminta bantuan APJII untuk melakukan sosialisasi kepada para anggotanya untuk tidak menggunakan frekuensi yang seharusnya diperuntukkan bagi BMKG.

"Sebenarnya sudah ada frekuensi yang dialokasikan dan bisa digunakan oleh masyarakat dan anggota APJII yakni frekuensi 2.400 - 2.483 MHz dan 5.725 - 5.825 MHz," katanya.

Setelah rapat koordinasi tersebut, Balmon Kominfo DKI Jakarta akan semakin tegas kepada siapa pun yang melakukan tindakan melanggar menggunakan frekuensi BMKG, termasuk juga bila ada anggota APJII yang kedapatan mengoperasikan frekuensi itu. Sehingga APJII sebagai organisasi internet terbesar di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada anggotanya.

"Karena tindakan itu bisa dimatikan perangkatnya yang berdampak terhadap operasional perusahaan. Sebenarnya tindakan sudah dilakukan oleh Balmon DKI Jakarta sebelum rapat ini. Tapi karena masih ada saja yang coba-coba. Makanya ada meeting bersama ini," ungkap Eva.

APJII berkomitmen terhadap persoalan ini, yakni mengimbau berulang kali kepada anggota untuk tidak menggunakan frekuensi BMKG dan menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan berlaku.

Untuk lebih menguatkan komitmen tersebut, APJII dan Balmon DKI Jakarta telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan persoalan tersebut. MoU itu ditandatangani oleh Ketua Umum APJII, Jamalul Izza dan pihak Balmon Kominfo DKI Jakarta. ***